

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Fakih (2004:8-9), perempuan adalah sosok yang lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan. Perempuan merupakan bagian terpenting dari kehidupan manusia. Keberadaan perempuan menjadi penting karena kehadirannya memberikan manfaat kepada sekelilingnya. Konsep mengenai perempuan sejak dahulu berkembang menyatakan bahwa perempuan merupakan makhluk yang lemah dan terbatas dari kehidupan publik.

R. A. Kartini adalah pelopor bergeraknya kehidupan perempuan di sektor publik sampai mulai terbangunnya organisasi-organisasi perempuan mulai tahun 1912. Pada awal perkembangan pemberdayaan perempuan hanya menekankan pada pendidikan untuk membuka wawasan perempuan. Namun, seiring perkembangannya dibangun pula kesadaran akan emansipasi perempuan.

Pengakuan akan keberadaan perempuan yang mampu disejajarkan dengan kaum laki-laki memberikan kesempatan dan peluang besar bagi banyak perempuan untuk ikut memperjuangkan kehidupannya untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik, misalnya melalui pendidikan yang lebih tinggi

perempuan mampu bekerja dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Perempuan yang dahulu hanya berada di sektor domestik untuk mengurus rumah tangga, kini sudah mampu berada di sektor publik untuk ikut serta dalam proses pemerintahan, pendidikan, serta lebih aktif dan memiliki peran yang juga dapat disejajarkan bersama dengan kaum laki-laki.

Contohnya adalah keberadaan Sri Mulyani Indrawati yang saat ini menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Sri Mulyani merupakan wanita bahkan orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Bank Dunia. Megawati Soekarno Putri yang juga pernah menjabat sebagai Presiden RI merupakan presiden perempuan pertama Indonesia telah membongkar anggapan bahwa perempuan tidak mampu berpartisipasi di dunia politik dan pemerintahan di Indonesia. Di Kota Bandar Lampung adalah keberadaan Eva Dwiana Herman H.N yang sempat menjabat Ketua DPC Partai Demokrat Provinsi Lampung yang menjadi salah satu contoh emansipasi wanita yang aktif dalam dunia politik.

Munculnya perempuan-perempuan yang mampu bergelut di sektor publik, memberikan gambaran bahwa perempuan adalah makhluk yang dapat disejajarkan dengan kaum laki-laki. Kehadiran perempuan memberikan warna dan perubahan tersendiri dalam sektor publik. Peran perempuan yang kini mulai terlihat di berbagai sektor kehidupan menjadi suatu gambaran bahwa perjuangan perempuan selama ini telah mencapai hasil yang baik. Kehidupan perempuan masa kini menjadi salah satu contoh adanya

pengakuan akan keberadaan perempuan yang mampu bersaing dan menjadi bagian penting dalam kehidupan publik.

Gender yang diartikan oleh Fakih (2004:8-9) merupakan suatu konsep budaya yang mengacu pada karakteristik yang membedakan antara perempuan dan laki-laki baik secara perilaku, mentalitas dan budaya sosial. Dengan demikian gender adalah perbedaan peran laki – laki dan perempuan yang dibentuk, dibuat dan dikonstruksi oleh masyarakat dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Pembahasan mengenai gender membahas mengenai kehidupan dan peran perempuan di seluruh bidang kehidupan, baik itu politik, sosial, budaya, keagamaan dan lain sebagainya.

Di dunia politik, yang terjadi adalah adanya diskriminasi terhadap perempuan baik dalam konsep demokrasi dan partisipasi. Konsep-konsep seperti kompetisi, partisipasi politik, demokrasi serta kebebasan sipil dalam kenyataan politik ternyata hanya terbatas pada dunia kaum laki-laki dan perempuan tidak memiliki peran yang berarti di dalamnya. Contohnya, dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 12 tahun 2012 Bab III pasal 8 huruf e terlihat bahwa ada batasan mengenai kiprah perempuan di dunia politik. Dalam pasal tersebut menyebutkan, “.....menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”.

Berdasarkan penelitian dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Sri Eko Wardhani menyatakan bahwa jumlah perempuan yang duduk di parlemen hanya 18 % dari total anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Nampak jelas bahwa dalam dunia politik terdapat diskriminasi mengenai porsi antara laki-laki dan perempuan dalam kedudukannya di parlemen. (<http://psikologisosiald5.blogspot.com/2013/12/diskriminasi-gender-dalam-ranah-politik.html>: 16 Maret 2014 pukul 22.50).

Adanya kesadaran perempuan untuk memperjuangkan haknya dalam memberikan aspirasi melalui keikutsertaannya dalam pemilihan umum, mendorong terbentuknya peran perempuan dalam dunia politik. Misalnya dengan bergabung dalam organisasi-organisasi politik baik itu partai atau organisasi lainnya. Beberapa nama perempuan yang sampai saat ini berkiprah di politik dan berjuang membela aspirasi rakyat dalam parlemen adalah Armida Alisjahbana (menteri Indonesia ahli ekonomi), Megawati (Presiden Wanita RI pertama), SK Trimurti (menteri Indonesia, pengajar, penulis, wartawan) dan Tuty Alawiyah (menteri Indonesia, anggota MPR RI).

Dalam lingkup keluarga, perempuan yang diwakili oleh ibu rumah tangga memiliki peran yang juga penting dalam pengambilan keputusan walaupun para lelaki yang menjadi kepala keluarganya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Evelyn Blackwood yang dikutip dalam Triwarmiyati (2009) menemukan bahwa pada sistem Matrilineal pada masyarakat Minang terjadi perubahan peran perempuan dalam keluarga. Pola komunikasi yang dimiliki perempuan memiliki kemampuan untuk menarik perhatian dan memberikan pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan dalam keluarga.

Pada acara forum silaturahmi perempuan elite politik dan peningkatan kapasitas perempuan caleg, yang diadakan oleh Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (Rabu, 21 Agustus 2013) di Jakarta, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar mengatakan bahwa peran perempuan dalam mengambil keputusan di parlemen dinilai sangat penting. Keterwakilan perempuan di DPR kini baru sekitar 18%. Menteri berharap pemilu mendatang lebih dari 18% karena percepatan retribusi hak politik perempuan sangatlah strategis untuk mendorong percepatan kemajuan di bidang lainnya.

Perempuan calon anggota legislative dari setiap partai politik perlu kreatif dan bersatu dalam kampanye di daerah pemilihannya masing-masing untuk meningkatkan jumlah 30% ketereakilan perempuan di parlemen dan meningkatkan keterpilihan serta partisipasi pemilih. Peningkatan itu mempercepat retribusi hak politik perempuan.

Disamping adanya berbagai masalah mengenai keikutsertaan perempuan dalam dunia politik, terdapat permasalahan yang mendasar di Indonesia yaitu masalah budaya. Budaya masyarakat yang sudah terbentuk sejak dahulu dan melekat sehingga menjadi suatu nilai yang dianggap penting dalam masyarakat merupakan salah satu permasalahan penting yang dihadapi para calon anggota legislative perempuan untuk terus maju dalam pemilihan umum. Mengenai penempatan nomor urut calon yang biasanya lebih diutamakan untuk pria sehingga perempuan mendapatkan nomor urut bawah hal ini dikarenakan perempuan yang dianggap lemah serta permasalahannya.

Selain permasalahan diatas, gerakan feminis sangat tidak menguntungkan bagi keterpilihan perempuan dalam pemilu karena calon-calon terpopuler dari masing-masing partai politik mayoritas pada calon laki-laki. Mayoritas ketua partai politik dan sekretaris jendral baik di DPP maupun di DPD/DPC diduduki oleh laki-laki. Posisi tersebut sangat strategis bagi seseorang untuk dikenal secara luas oleh public bahkan jajaran kepengurusan elit partai politik mayoritas didominasi oleh laki-laki, kecuali pada bidang tertentu yang biasanya diduduki perempuan karena tidak diminati oleh laki-laki misalnya pada bidang pemberdayaan perempuan.

Diperlukan strategi kampanye yang efektif bagi perempuan untuk dapat mengejar ketertinggalan mereka dari kaum laki-laki, baik dalam persaingan dengan calon laki-laki dari satu partai maupun dari partai lain di satu daerah pemilihan. Pandangan partai akan peranan perempuan menjadi penting apabila partai dapat melihat berbagai peluang yang ada. Salah satu contohnya adalah pada Partai Demokrat yang juga memberdayakan perempuan dalam proses kampanye pemilu melalui adanya departemen khusus yang menanungi masalah perempuan dan anak.

Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan bagian dari Partai Demokrat yang terus berusaha untuk mengembangkan potensi perempuan dan memberikan pelajaran kepada perempuan tentang politik dan pentingnya keikutsertaan perempuan di dalam dunia politik.

Ketua Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPP Partai Demokrat Andi Timo Pangerang memaparkan bahwa partai politik adalah

tempat mendidik kader perempuan dalam jabatan politik, oleh sebab itu perempuan dituntut mampu memberikan warna dalam isu politik. Perempuan Partai Demokrat harus mampu berkiprah di tengah – tengah masyarakat, aktualisasi diri penting dilakukan agar potensi tetap terjaga bahkan bertambah di 2014. Dapat terlihat bahwa Partai Demokrat baik itu di pusat atau di daerah memiliki pemahaman pentingnya pemberdayaan perempuan dalam politik.

Kehadiran perempuan akan memberikan warna dalam proses politik. Hal tersebutlah yang menjadi tujuan Partai Demokrat dalam upaya memberdayakan perempuan dalam politik dan kampanye pemilu. (<http://politik.kompasiana.com/2010/07/27/perempuan-penentukemenangan-politik-205705.html>: diakses pada 15 Februari 2014 pukul 19.30).

Partai Demokrat hadir melalui adanya DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung. DPD ini diketuai oleh M. Ridho Ficardo, M.Si yang juga tengah mencalonkan diri sebagai Gubernur Lampung periode 2014-2019. Didalam struktur kepengurusan DPD Partai Demokrat Lampung terdapat satu bidang yang menangani masalah perempuan, yaitu bidang Pemberdayaan Perempuan yang diketuai oleh Fita Nadia dengan wakilnya adalah Cindawani.

Partai Demokrat merupakan partai yang memiliki komitmen yang kuat dalam pemberdayaan perempuan dan sangat menghargai keberadaan perempuan dalam tubuh Partai Demokrat. Selain itu, Partai Demokrat sangat fokus untuk terus berusaha memenuhi kuota 30% kedudukan bagi kader perempuan dalam kursi legislatif. Menurut Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi

Lampung dalam sambutannya pada kegiatan Diskusi Publik dan Silaturahmi Daerah Perempuan Partai Demokrat Provinsi Lampung (18/10/2012) menekankan pentingnya perempuan memahami potensi yang ada dalam dirinya dalam hal persamaan hak politik.

Untuk mencapai target keterwakilan perempuan di legislatif, Partai Demokrat menyiapkan kader secara kuantitas dan kualitas, oleh sebab itu kegiatan seperti ini penting dilaksanakan agar proses rekrutment dan analisa kader perempuan menuju pemilu 2014 semakin berkualitas dengan didukung kuantitas yang memadai sehingga tercapai pemenuhan kuota 30% perempuan yang berhasil duduk dalam kursi legislatif di Provinsi Lampung (<https://www.google.com/#q=Diskusi+Publik+dan+Silaturahmi+Daerah+Perempuan+Partai+Demokrat+Provinsi+Lampung+>: diakses pada 15 Februari 2014 pukul 19.45).

Selain itu dalam memberdayakan perempuan, DPD Partai Demokrat Lampung memiliki sayap partai yang juga fokus pada perempuan. Terdapat PDRI (Perempuan Demokrat Republik Indonesia) yang diketuai oleh Getwien Mosse Umboh S.H dan Majelis Taklim Ar-Ridho yang diketuai oleh Sarifah. Kedua sayap partai ini selain fokus dalam pemberdayaan perempuan dan meningkatkan kemandirian dan kesadaran perempuan di dunia politik dan pemerintahan melalui kampanye untuk memenangkan suara dalam pemilu.

Akan tetapi bila dilihat dari perkembangan saat ini, citra Partai Demokrat menjadi kurang baik dikarenakan kader-kadernya yang tersandung kasus

hukum termasuk kader perempuan Partai Demokrat. Contohnya saja kasus korupsi yang menyeret nama Angelina Sondakh yang merupakan kader Demokrat. KPK menetapkan Anggota Komisi X DPR Angelina Sondakh sebagai tersangka dalam kasus suap pembangunan wisma atlet di Jakabaring. (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f2bb475675f2/angelina-sondakh-jadi-tersangka->: diakses pada 25 Februari 2014 pukul 19.15).

Nama lain yang juga disebut mencoreng citra kader perempuan dalam Partai Demokrat adalah Hartati Murdaya dan Andi Nurpati. Hartati Murdaya yang merupakan anggota Dewan Pembina Pusat dan juga pernah menjabat sebagai bendahara Partai Demokrat terseret dalam kasus pidana. Ia terlibat suap pengurusan sertifikat Hak Guna Usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Buol dan mendapatkan hukuman selama 2 tahun 8 bulan, pidana denda Rp 150 juta. (<http://nasional.inilah.com/read/detail/1956986/inilah-kronologi-kasus-suap-hartati-murdaya#.UwyQwD2Szv8>: diakses pada 15 Februari 2014 pukul 19.36).

Berbeda dengan kedua nama diatas, Andi Nurpati yang merupakan pengurus DPP Partai Demokrat melakukan tindak pidana terkait putusan sengketa Pemilu Sulawesi Selatan tentang pemberian kursi legislatif di DPR yang dikeluarkan MK pada 2009 lalu. Pidana itu dilakukan Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat yang saat itu menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum tahun 2009.

(<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/223102-keganjilan-kasus-andi-nurpati-versi-mk>: diakses pada 15 Februari 2014 pukul 20.15).

Partai Demokrat yang menyatakan dirinya sebagai partai yang komitmen dengan pemberdayaan perempuan serta memiliki strategi yang santun dan cerdas dalam pemberdayaan perempuan ternyata belum mampu membawa kader partai ini untuk mempertanggung jawabkan komitmen yang diusung oleh Partai Demokrat. Partai Demokrat merupakan partai besar dan merupakan partai kader. Semua kader Partai Demokrat telah melalui kaderisasi dan memiliki kualifikasi yang diusung partai. Namun semua itu kembali kepada pribadi masing-masing kader walaupun penilaian akan suatu partai dilihat juga berdasarkan tingkah laku kader partai yang bersangkutan.

Partai Demokrat merupakan partai yang mengawali perjalanan politik dengan strategi yang baik sehingga mampu bersaing dan memenangkan pemilu selama dua periode sebelumnya serta berkomitmen akan pemberdayaan perempuan sehingga menghasilkan kader perempuan yang berkualitas dan berkarakter. Saat ini terdapat berbagai kasus pidana yang dialami oleh kader-kader perempuan di Partai Demokrat baik itu di pusat ataupun di daerah. Fakta menggambarkan adanya ketimpangan yang terjadi mengenai konsep pemberdayaan perempuan yang berakibat pada nama baik dan citra partai yang berakibat akan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai bernuansa biru ini.

Diperlukan strategi yang tepat oleh Partai Demokrat untuk kembali memenangkan suara seperti dua periode silam dimana partai ini terbukti mampu bersaing dan memenangkan pemilu meskipun Partai Demokrat adalah partai baru. Kegagalan partai dalam menghadirkan kader perempuan

yang bersih dari berbagai kasus menjadi tugas Partai Demokrat untuk terus memperbaiki diri dan mengembalikann kepercayaan masyarakat sehingga kadr-kader perempuan yang akan maju di pemilihan umum tahun 2014 dapat memberikan kemenangan kepada Partai Demokrat.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam terhadap strategi pemberdayaan calon anggota legislatif perempuan dalam kampanye pemilihan umum legislatif 2014 oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung. Adanya berbagai kasus yang dialami oleh Partai Demokrat sehingga membuat citra partai yang mulai menurun mendorong peneliti untuk melihat usaha Partai Demokrat memenangkan kader perempuan partai untuk memperoleh kemenangan dalam pemilihan umum tahun 2014 melalui berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan yang menjadi salah satu faktor penting dalam memenangkan pemilu 2014.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian di atas maka masalah dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : “Bagaimana strategi pemberdayaan calon anggota legislatif perempuan dalam kampanye pemilihan umum legislatif tahun 2014 oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi pemberdayaan calon anggota legislatif perempuan dalam kampanye pemilihan umum legislatif tahun 2014 oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara akademik, hasil penelitian ini sebagai salah satu kajian Ilmu Pemerintahan khususnya di bidang partai politik dan pemilu dalam aspek fungsi gender dalam kampanye pemilu oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini sebagai evaluasi strategi yang dapat dipilih dalam kampanye dan memberikan masukan kepada Partai Demokrat untuk memaksimalkan pemberdayaan perempuan dalam kampanye pemilu.